

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Di berbagai belahan dunia, pariwisata telah terbukti menjadi penggerak utama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat citra suatu wilayah di tingkat nasional maupun internasional. Indonesia, dengan kekayaan alam dan budayanya, memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor pariwisata di berbagai daerah, termasuk desa-desa yang memiliki keunikan tersendiri. Desa wisata menjadi salah satu pendekatan yang mulai banyak diimplementasikan untuk mengoptimalkan potensi lokal dan mendorong pembangunan berbasis masyarakat (Kuswandi, 2020).

Salah satu upaya Indonesia dalam meningkatkan devisa nonmigas adalah melalui sektor pariwisata, yang merupakan bagian dari sektor jasa. Mengingat infrastruktur pariwisata masih dalam tahap pengembangan dan hanya mengalami kendala terkait keamanan yang dapat mengurangi minat wisatawan, sektor ini memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tercepat, terutama saat krisis ekonomi. Pemerintah daerah dihadapkan pada dua tantangan utama, yaitu kebutuhan pendanaan yang tinggi untuk operasional pemerintahan serta keterbatasan sumber daya alam. Oleh karena itu, solusi yang dapat diterapkan

adalah mengembangkan sektor-sektor yang tidak bergantung pada sumber daya alam, seperti sektor yang mendukung industri pariwisata.(Usman et al., 2012).

Dasar hukum pengembangan pariwisata yang sesuai dengan prinsip pengembangan adalah Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan tentang Pembangunan Kepariwisataan (Pasal 6: Pembangunan Kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata, pasal 8: (1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. (2) pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Pasal 11: pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.) serta UU No 10 tahun 2009 tentang kawasan strategis (pasal 12:1) aspek-aspek penetapan kawasan strategis pariwisata) (Kuswandi, 2020).

Pengembangan sektor pariwisata sering kali menjadi tantangan dalam pembangunan daerah karena harus menyeimbangkan antara keuntungan ekonomi dengan pelestarian lingkungan serta budaya lokal. Banyak daerah menghadapi berbagai masalah, seperti degradasi lingkungan akibat pembangunan, peningkatan volume sampah, dan perubahan sosial budaya yang dapat mengancam tradisi setempat. Selain itu, manfaat ekonomi dari pariwisata sering kali tidak merata, di mana hanya sebagian kecil pihak yang menikmatinya, sementara masyarakat lokal memperoleh keuntungan yang terbatas. Jika tidak direncanakan dengan baik, pengembangan pariwisata juga bisa memicu konflik kepentingan antara pelaku usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pariwisata yang

terstruktur, inklusif, dan berkelanjutan agar sektor ini dapat mendorong pembangunan daerah tanpa mengabaikan aspek lingkungan, sosial, dan budaya (Akay et al., 2021).

Salah satu faktor penting adalah kemampuan pemerintah daerah untuk membuat dan menetapkan kebijakan yang akan mendukung pertumbuhan sektor pariwisata. Karena potensi pariwisata sangat besar, daerah-daerah ini harus mengoptimalkan keunggulannya. Pemerintah daerah yang memiliki alam yang indah harus memberi prioritas pembangunan destinasi wisata unggulan. Berbagai potensi pariwisata harus dikelola dengan mempertimbangkan kondisi industri dan karakteristik unik setiap daerah (Kuswandi, 2020).

Kabupaten Muaro Jambi memiliki beragam potensi wisata yang luar biasa, termasuk warisan budaya tak benda seperti Budaya Tekud, Kesenian Begambang, Tari Lukah Gilo, Zikir Berdah, dan Tari Bejolo. Salah satu destinasi wisata unggulan di daerah ini adalah Candi Muaro Jambi, yang merupakan kompleks candi terluas di Asia Tenggara dengan luas mencapai 3.981 hektare. Candi ini telah diakui sebagai Warisan Dunia oleh UNESCO dan mencerminkan peradaban Hindu-Buddha kuno dari abad ke-7 hingga ke-12, yang diyakini memiliki keterkaitan dengan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu. Berlokasi di Kecamatan Maro Sebo, kompleks ini berjarak sekitar 26 kilometer dari pusat Kota Jambi dan dapat ditempuh dalam waktu sekitar 37 menit menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. (Setiawan et al., 2022).

Desa Danau Lamo, yang berada di Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi terletak di sekitar Candi Muaro Jambi, dikenal dengan berbagai budaya dan adat istiadatnya. seperti makanan tradisional, hukum adat, arsitektur rumah asli masyarakat, serta perilaku dan adat istiadat yang khas. Semua elemen budaya tersebut merupakan nilai yang sangat berharga. Banyak orang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang tertarik untuk mempelajari dan mengenal lebih dalam tentang budaya yang ada di desa ini. salah satu budaya uniknya adalah budaya Tkud yang telah diwariskan turun temurun oleh masyarakat setempat. Pada zaman

dahulu, budaya Tkud digunakan untuk memanggil hewan, terutama harimau, yang disebut sebagai Datuk. Meskipun demikian, hingga kini sebagian warga desa masih menggunakan istilah tersebut untuk memanggil burung. Selain itu, kesenian Begambang yang dulunya dimainkan sebagai musik pengiring dalam kegiatan menanam padi dan acara adat, kini juga dipentaskan dalam acara pernikahan dan khitanan sebagai bentuk penyambutan tamu (Jambi berita, 2019).

Tari Lukah Gilo adalah tarian tradisional yang memiliki nuansa magis yang menggambarkan permainan masa lalu. Menurut Budi (2019), tarian ini adalah salah satu cara anak-anak di desa menghibur diri. Selain itu, budaya Zikir Berdah memiliki makna yang lebih besar daripada sekadar hiburan; itu adalah cara untuk menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan. Musik yang indah dibuat oleh lantunan zikir dan rebana siam. Sebaliknya, Tari Bejolo menceritakan bagaimana masyarakat Dusun Tanjung bercocok tanam setiap hari, mulai dari berangkat ke ladang hingga panen. Setiap aktivitas dari kegiatan ini memiliki beberapa property yang memiliki keunikan dan nilai budaya. (Zulfadant, 2018).

Komunitas Mahligai Budaya adalah kelompok pemuda dari Desa Danau Lamo yang berusaha untuk mempertahankan dan mempertahankan budaya lokal desa. Didirikan pada tahun 2015, komunitas ini memiliki 20 anggota dan dipimpin oleh Maskur. Sebagai hasilnya, Seni Budaya Begambang menerima sertifikat Warisan Budaya Takbenda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017. Selain itu, pada tahun 2019, mereka menerima sertifikat budaya Tkud sebagai pengakuan atas upaya mereka untuk melestarikan budaya, mempertahankan kearifan lokal, dan mengembangkan dan menyebarkanannya (Setiawan et al., 2022).

Kemudian Desa Danau Lamo memiliki kekayaan sejarah dan budayanya. Keberadaan situs-situs bersejarah seperti Candi Kedaton dan Candi Koto Mahligai menjadikan desa ini sebagai destinasi unggulan bagi para pencinta sejarah dan budaya. Candi-candi tersebut tidak

hanya menjadi saksi bisu kejayaan peradaban masa lalu, tetapi juga menyimpan nilai-nilai arkeologis dan historis yang berharga. Dengan memadukan keindahan alam sekitar, tradisi lokal, serta kegiatan wisata edukatif, Desa Danau Lamo dapat dikembangkan menjadi pusat wisata yang menarik dan berkelanjutan. Pengelolaan yang baik, seperti penyediaan fasilitas pendukung, pelestarian candi, dan promosi wisata berbasis budaya, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat sekaligus menjaga warisan leluhur untuk generasi mendatang.

Beragamnya kekayaan sejarah dan budayanya wisata di Desa Danau Lamo ini, sayangnya belum dikelola secara optimal. Terdapat beberapa permasalahan infrastruktur, terutama jalan dan fasilitas pendukung wisata masih terbatas, dan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan penciptaan inovasi. Pengelolaan desa wisata Desa Danau Lamo yang belum maksimal saat ini berisiko menghambat pertumbuhan industri pariwisata. Hal ini diperburuk dengan munculnya destinasi wisata baru di sekitarnya, yang mengancam daya saing Desa Danau Lamo. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pengelolaan desa dan daya tarik wisatawan, diperlukan persiapan komprehensif. (Baidawi et al., 2024).

Gubernur Jambi, Al Haris, menyatakan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan hampir Rp 900 miliar untuk revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi. Dana ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan pariwisata di Jambi. Ia juga mengimbau agar kegiatan budaya dan pariwisata, baik yang berskala lokal maupun nasional, diadakan lebih sering. Hal ini bertujuan untuk mendorong lebih banyak pihak untuk terlibat dalam kolaborasi tersebut. (Tambunan, 2023).

Namun, meskipun pemerintah telah mengalokasikan dana yang besar untuk revitalisasi, tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Muaro Jambi masih kalah jauh dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain di Jambi. Dari 11 daerah di Provinsi Jambi, tingkat kunjungan

ke Muaro Jambi hanya berada di posisi ketujuh. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur dan promosi yang kuat saja belum cukup untuk meningkatkan daya tarik wisatawan.

Dilansir dari laman berita Kompas.id “*Kunjungan wisatawan ke Muaro Jambi bahkan kalah dibandingkan Kabupaten Tebo,*” kata Hermanto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jambi, dalam *Kenduri Budaya 2023 di KCBN Muara Jambi, Minggu (5/11/2023)*. Lebih lanjut *Padahal, Tebo selama ini kurang dikenal sebagai kawasan pariwisata. Oleh karena itu, kolaborasi diperlukan demi mengembangkan pariwisata di daerah itu*” (Tambunan, 2023)

Pernyataan berita diatas, mengutip pernyataan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jambi dapat di katakan bahwa sektor pariwisata di Muaro Jambi masih kurang berkembang dibandingkan daerah lain yang sebenarnya kurang dikenal sebagai destinasi wisata, seperti Kabupaten Tebo. Hal ini menunjukkan adanya potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk mengembangkan daya tarik wisata Muaro Jambi. Dengan strategi promosi yang lebih efektif, peningkatan infrastruktur, serta dukungan kebijakan yang tepat, Muaro Jambi dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan mengoptimalkan potensi ekonominya.

Dilansir dari laman berita Kompas.id Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Agus Widiatmoko mengatakan, “*pengembangan KCBN memerlukan dukungan dan kolaborasi. Pengembangan ini mengedepankan sentuhan nilai-nilai budaya dan lokalitas. segere merevitalisasi sejumlah titik, di antaranya Koto Mahligai, Astano, dan Kedaton, serta berikutnya membangun museum*” (Tambunan, 2023)

Pernyataan diatas oleh Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V menyatakan bahwa Pengembangan Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) membutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak dengan tetap mengutamakan nilai budaya dan kearifan lokal. Sebagai bagian dari upaya pelestarian, akan dilakukan revitalisasi beberapa titik penting, seperti Koto Mahligai, Astano, dan Kedaton, serta pembangunan museum untuk memperkuat aspek edukasi dan pelestarian budaya.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, ditemukan beberapa masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat, antara lain: 1) Masyarakat di Desa Danau Lamo belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai wisata budaya, manfaatnya, serta cara melestarikan budaya yang ada. 2) Belum terdapat pemetaan yang terperinci tentang potensi budaya yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Danau Lamo. 3) Kehadiran media seperti situs web (E-Tourism) yang dapat memfasilitasi informasi mengenai potensi budaya di desa ini belum ada, sehingga baik pemerintah maupun masyarakat kesulitan dalam mengakses informasi terkait budaya yang dimiliki oleh masyarakat Desa Danau Lamo (Setiawan et al., 2022).

Dilansir dari laman berita [jambiexpres.disway.id](http://jambiexpres.disway.id) tahun 2024. Michael Lega menyebutkan tantangan yang dihadapi dalam melestarikan budaya ini diantaranya regenerasi dan pengembangan. Saat ini, potensi budaya seperti musik dan tari, anyaman, dan sejenisnya, hanya dilakukan oleh para generasi yang berusia lanjut. Sehingga mereka membutuhkan regenerasi. selama ini, mereka kesulitan mengembangkan khususnya potensi budaya dibidang seni musik dan tari, sehingga tidak ada bentuk-bentuk kreasi baru” (Misriyanti, 2024).

Permasalahan diatas menunjukkan bahwa, masalah regenerasi dan pengembangan budaya sangat berhubungan dengan pembangunan daerah. Jika generasi muda tidak terlibat dalam melestarikan budaya tradisional, seperti musik, tari, dan kerajinan, maka budaya tersebut bisa hilang dan daerah akan kehilangan identitasnya. Selain itu, tanpa inovasi dalam budaya, daerah kesulitan untuk menarik perhatian wisatawan dan mengembangkan sektor ekonomi kreatif. Namun, dengan melibatkan generasi muda dan mendorong mereka untuk menciptakan kreasi baru dari budaya tradisional, daerah dapat menjaga dan mengembangkan budaya yang ada. Ini bisa membuka peluang untuk sektor pariwisata dan menciptakan lapangan kerja di bidang seni dan kerajinan. Dengan kata lain, regenerasi dan pengembangan budaya yang baik tidak hanya melestarikan tradisi, tetapi juga dapat mendorong kemajuan ekonomi dan meningkatkan daya tarik daerah.

Selanjutnya, berdasarkan telah dilakukannya pra penelitian, dilakukan observasi dan wawancara dengan Bapak Abdul Roni sebagai Sekretaris Desa Danau Lamo, di Desa Danau Lamo pada tanggal 21 Desember 2024. Hasilnya menunjukkan beberapa masalah yang timbul, di antara masalah yang ditemukan adalah Pemerintah setempat menghadapi kebingungan dalam menggunakan media sosial sebagai alat promosi wisata karena kurangnya pemahaman teknis dan strategis. Mereka sering kali tidak menguasai cara mengelola media sosial secara efektif, seperti menentukan target audiens, membuat konten menarik, atau memanfaatkan fitur algoritma untuk meningkatkan jangkauan promosi. Selain itu, sumber daya manusia yang terampil, serta kurangnya kolaborasi dengan profesional di bidang pemasaran digital semakin memperburuk situasi. Akibatnya, upaya promosi wisata yang dilakukan menjadi kurang maksimal dan tidak mencapai hasil yang diharapkan.

*“...Untuk saat ini, kami belum memiliki tim khusus yang mengelola media sosial. Semua ini masih dikerjakan secara sukarela oleh beberapa staf desa yang punya sedikit pengetahuan tentang media sosial. Kami juga kesulitan untuk berkolaborasi dengan profesional di bidang pemasaran digital karena keterbatasan anggaran dan sumber daya...”* (Wawancara dengan Sekretaris Desa Danau Lamo, tanggal 21 Desember 2024, pada pukul 11.30 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan media sosial di desa masih dilakukan secara informal dan bergantung pada inisiatif beberapa staf desa yang memiliki pengetahuan dasar tentang media sosial. Tidak adanya tim khusus yang mengelola media sosial menunjukkan bahwa pengelolaan ini belum menjadi prioritas strategis. Selain itu, keterbatasan anggaran dan sumber daya menjadi kendala utama dalam menjalin kerja sama dengan profesional pemasaran digital, yang seharusnya dapat membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan media sosial. Kondisi ini mencerminkan perlunya upaya lebih lanjut dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia serta alokasi anggaran yang lebih memadai untuk mendukung komunikasi dan promosi desa secara digital.

Generasi muda sebenarnya memiliki potensi besar dalam pelestarian budaya yang fleksibel dan berbasis partisipasi. Dengan memanfaatkan platform digital, mereka dapat

mendokumentasikan, mengembangkan, dan mempromosikan budaya secara lebih luas dan menarik. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan serta inovasi berbasis teknologi dapat memastikan budaya tetap lestari dan memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Hal ini jika dilakukan maka akan dapat menjawab persoalan Pemerintah Desa yang tidak adanya tim khusus yang mengelola media sosial.

Salah satu contoh nyata bagaimana generasi muda berperan dalam *adaptive governance* untuk pelestarian budaya melalui platform digital dapat dilihat dari Desa Betung Bedarah, Kabupaten Tebo, Jambi. Desa ini berhasil mengembangkan pariwisata berbasis budaya dengan melibatkan generasi muda dalam berbagai kegiatan, termasuk dokumentasi budaya, promosi digital, dan inovasi berbasis teknologi.

Pesatnya pertumbuhan pengguna teknologi informasi di Indonesia membuka peluang besar bagi dunia usaha untuk memanfaatkan platform digital dalam memasarkan bisnisnya. Pemerintah pun memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan informasi dan mempromosikan sektor-sektor strategis, seperti pariwisata. Kemajuan teknologi yang tak terelakkan menuntut setiap sektor untuk menyambutnya dengan semangat baru dalam era digital. Inovasi yang berkelanjutan menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang muncul di dunia digital ini (Putu Henny Puspawati & Ristanto, 2018).

Berdasarkan permasalahan tersebut, pengembangan wisata di Desa Danau Lamo, Kabupaten Muaro Jambi, menunjukkan bahwa berbagai permasalahan yang muncul dalam proses pengelolaan dan pengembangan wisata sangat penting untuk ditinjau kembali. Beberapa tantangan utama yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah 1). ketidakseimbangan dalam partisipasi masyarakat, 2). kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan, 3). dampak negatif terhadap lingkungan yang dapat mengancam keberlanjutan wisata. 4). informasi tentang kekayaan budaya tersebut masih sangat minim. 5). Kurangnya pengolahan

informasi budaya yang ada mencerminkan rendahnya usaha sistematis dalam mengenali, mendokumentasikan, dan mempromosikan kekayaan budaya. Tanpa pengelolaan yang optimal, potensi budaya sering kali terabaikan atau terlupakan, sehingga tidak dapat menjadi daya tarik wisata yang bernilai ekonomi tinggi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan dalam tata kelola, transparansi pengambilan keputusan, serta peningkatan kapasitas masyarakat dan pihak terkait agar tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan tercapai. Perbaikan atas permasalahan ini akan sangat memengaruhi keberhasilan program pariwisata dan manfaat yang dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat, baik masyarakat, pemerintah, maupun wisatawan.

Masalah empiris yang dihadapi Desa Danau Lamo mencerminkan adanya kelemahan dalam pengelolaan wisata budaya. Kelemahan ini meliputi kurangnya strategi yang terintegrasi untuk pengelolaan dan promosi kekayaan budaya lokal, minimnya pendokumentasian aset budaya yang dapat dijadikan daya tarik wisata, serta rendahnya keterlibatan pemangku kepentingan seperti komunitas lokal dan sektor swasta dalam pengelolaan pariwisata. Selain itu, penggunaan teknologi untuk mendukung identifikasi dan promosi budaya masih sangat terbatas, sehingga potensi wisata budaya yang ada belum optimal dalam menarik perhatian wisatawan maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

*Adaptive governance*, seperti yang dikemukakan oleh (Djalante et al., 2011), menawarkan pendekatan yang responsif dan partisipatif untuk mengatasi tantangan ini. Pendekatan ini menekankan pentingnya sistem pengelolaan yang adaptif terhadap perubahan serta melibatkan semua pihak terkait, termasuk pemerintah, komunitas lokal, dan sektor swasta. Dalam konteks Desa Danau Lamo, *adaptive governance* dapat mendorong pengembangan strategi berbasis teknologi untuk mendokumentasikan kekayaan budaya serta memaksimalkan promosi melalui media digital. Dengan membangun platform kolaboratif dan memanfaatkan data dari umpan balik wisatawan, desa dapat menyesuaikan pendekatan mereka secara dinamis.

Hal ini tidak hanya membantu dalam melestarikan warisan budaya tetapi juga mengubahnya menjadi aset ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing pariwisata lokal, dan memperkuat identitas budaya masyarakat setempat.

Pembangunan daerah bisa dilakukan dengan memperkuat birokrasi, regulasi, dan sistem manajemen lainnya, hal tersebut dapat di dilihat pada konsep *adaptive governance*. Dengan dijalankannya *adaptive governance* diharapkan mampu menyelesaikan masalah dalam pembangunan daerah salah satunya yaitu objek wisata di desa yang belum dikembangkan. Dengan merangkum seluruh pola pemerintahan untuk mendefinisikan kembali peran mereka dan memfasilitasi tujuan dari pemerintahan, baik pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi maupun pemerintahan daerah (Norman et al., 2020). Pemerintahan adaptif juga mendefinisikan atau menggambarkan sebagaimana bentuk koordinasi sosial di mana individu dan organisasi memiliki kemampuan yang sesuai untuk mengkoordinasikan tindakan secara sukarela (Engkus et al., 2020).

Penelitian tentang *Adaptive Governance pada Pengembangan Wisata Budaya di Desa Danau Lamo, Kabupaten Muaro Jambi* erat kaitannya dengan ilmu sosial dan ilmu politik dalam konteks Ilmu Pemerintahan. Dari perspektif ilmu sosial, penelitian ini menyoroti bagaimana masyarakat berinteraksi dan beradaptasi dengan pengembangan wisata budaya, termasuk dalam pelestarian tradisi, pemberdayaan masyarakat, serta dinamika sosial yang muncul. *Adaptive governance* menekankan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga penelitian ini juga melihat bagaimana keterlibatan masyarakat dalam kebijakan pariwisata yang berkelanjutan. Sementara itu, dari aspek ilmu politik, penelitian ini mengkaji kebijakan publik dalam wisata budaya, peran pemerintah daerah dalam tata kelola adaptif, serta koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. *Adaptive governance* memungkinkan kebijakan yang fleksibel dan berbasis partisipasi agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini

menegaskan bahwa pengembangan wisata budaya membutuhkan tata kelola yang adaptif melalui pendekatan sosial dan politik yang sejalan dengan prinsip-prinsip Ilmu Pemerintahan.

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan 5 penelitian terdahulu. Peneliti mencantumkan penelitian terdahulu dalam penelitiannya untuk menggunakan mereka sebagai referensi. Ini membantu mereka menyajikan sudut pandang yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu telah dikelompokkan oleh peneliti sebagai referensi dalam penelitian ini, yaitu terbuat dalam bentuk tabel sebagai berikut.

**Tabel 1. 1. Penelitian Terdahulu**

No	Jenis Pengelompokan	Hasil Temuan
1	Pengembangan Desa Danau Lamo sebagai Desa Wisata	(Setiawan et al., 2022). (Ulul Azmi, 2021). Berdasarkan beberapa <i>literatur review</i> ini dapat disimpulkan bahwa Kegiatan pengabdian yang dilakukan di Desa Muaro Jambi telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam sektor pariwisata, menjadikan desa ini sebagai destinasi wisata yang menarik. Perkembangan pariwisata di Desa Muaro Jambi tidak hanya meningkatkan daya tarik budaya dan sejarah, tetapi juga memberikan dampak positif pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat. Penduduk desa memanfaatkan peluang yang muncul dari sektor pariwisata, seperti peningkatan ekonomi melalui pengelolaan

		usaha lokal, homestay, dan jasa pemanduan wisata.
2	Pendampingan Dan Pelatihan Strategi Pengelolaan Bisnis Di Kawasan Wisata Muaro Jambi	(Fitriaty et al., 2021). Berdasarkan beberapa <i>literatur review</i> ini dapat disimpulkan bahwa Pendampingan dalam merancang strategi usaha kini menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat Desa Muara Jambi agar mampu bersaing dengan pengusaha swasta maupun besar lainnya. Dengan demikian, mereka juga dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan destinasi wisata di wilayah tersebut.
3	Implementasi Terhadap Peningkatan Kapasitas Aparat Desa Dalam Hal Menyusun Peraturan Desa Danau Lamo	(Nuriyatman et al., 2024) Berdasarkan beberapa <i>literatur review</i> ini dapat disimpulkan bahwa Menurut beberapa penelitian, program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini telah menghasilkan dokumen akademik dan rancangan peraturan desa yang berfokus pada pembangunan desa wisata dan desa adat di Desa Danau Lamo. Diharapkan bahwa peraturan desa ini dapat diterapkan secara efektif dengan melibatkan partisipasi aktif perangkat desa untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat. Pemberdayaan yang kuat dan

		partisipasi aktif semua pihak adalah dasar dari proses ini.
4	Analisis Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemanfaatan Potensi Desa Muara Jambi	(Solehah, 2024). Berdasarkan beberapa <i>literatur review</i> ini dapat disimpulkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Kajang Lako belum optimal.. Hal ini disebabkan oleh kurangnya SDM yang terlibat dalam badan usaha tersebut, sehingga pengelolaan potensi desa belum mengalami peningkatan yang signifikan. Meskipun ada prinsip-prinsip tata kelola yang diterapkan seperti transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran, namun peran BUMDes dalam pengelolaan potensi desa perlu diperkuat untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Sumber : Diolah oleh Peneliti Tahun 2024

Berdasarkan pada Tabel 1.2. Penelitian terdahulu diatas, dimana penelitian terdahulu memiliki kesamaan yang membahas terkait pengembangan objek wisata di Desa Danau Lamo. Namun memiliki fokus kajian yang berbeda. belum ada penelitian yang secara menyeluruh menganalisis lebih fokus terhadap penilaian *adaptive governance* pada pengembangan objek wisata. Hal ini membuat peneliti tertarik dengan lebih fokus melihat tujuan bagaimana konsep *adaptive governance* dalam menyelesaikan permasalahan mengenai pengembangan objek wisata yang belum ada solusinya dengan mengidentifikasi peran ataupun kinerja pemerintah tersebut yang dapat dilihat dari cara komunikasi dan kolaborasi serta pelibatan partisipasi pemerintah terhadap penemuan solusi yang konkrit mengenai permasalahan

maupun evaluasi dan perbaikan kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap permasalahan pengembangan objek wisata ini. Oleh karena itu, berangkat dari permasalahan tersebut sesuai dengan faktanya terkait dengan konsep *adaptive governance*, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**ADAPTIVE GOVERNANCE PADA PENGEMBANGAN WISATA BUDAYA DI DESA DANAU LAMO KABUPATEN MUARO JAMBI**”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah Setelah mengkaji latar belakang yang telah diuraikan diatas, ditentukan masalah pokok dalam penelitian ini yakni:

- 1.2.1. Bagaimana *adaptive governance* pada pengembangan wisata budaya di Desa Danau Lamo Kabupaten Muaro Jambi?
- 1.2.2. Bagaimana upaya *adaptive governance* untuk mendukung promosi wisata di Desa Danau Lamo?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis yang ingin dicapai sehubungan dengan diadakan penelitian ini adalah :

- 1.3.1. Untuk mengetahui implementasi *adaptive governance* pada pengembangan wisata di Desa Danau Lamo Kabupaten Muaro Jambi.
- 1.3.2. Untuk mengetahui upaya *adaptive governance* untuk mendukung promosi wisata di Desa Danau Lamo.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat adalah nilai kegunaan yang berarti kontribusinya bagi subjek yang diteliti, peneliti itu sendiri, dan kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang ilmu pemerintahan. Oleh karena itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu, terutama dalam bidang ilmu pemerintahan dan tata kelola adaptif (*adaptive governance*) di sektor pariwisata. Penelitian ini membahas bagaimana prinsip-prinsip tata kelola adaptif diterapkan dalam pengembangan wisata di Desa Danau Lamo, Kabupaten Muaro Jambi. Melalui penelitian ini, penulis juga menerapkan ilmu yang didapat selama kuliah, khususnya terkait kebijakan berbasis teknologi digital untuk pengelolaan pariwisata yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai peran tata kelola adaptif dalam mendukung promosi pariwisata di daerah terpencil guna mendorong pertumbuhan sektor tersebut."

## 2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang penerapan tata kelola adaptif dalam pengembangan sektor pariwisata di Desa Danau Lamo. memberikan informasi kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, agar mereka dapat merumuskan kebijakan dan strategi promosi yang lebih adaptif dan berbasis teknologi, yang efisien serta terjangkau. Hal ini dapat berkontribusi pada pengembangan pariwisata yang lebih berkelanjutan, meningkatkan perekonomian lokal, serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan wisata di Desa Danau Lamo.

## 1.5. Landasan Teori

Teori membantu peneliti menganalisis topik yang dikaji dan menemukan sumber masalah di lapangan. Teori juga membantu mendefinisikan indikator, menganalisis, dan membantu peneliti menyelesaikan masalah sesuai dengan pengukuran variabel penelitian. Teori-teori ini digunakan oleh peneliti untuk menyelesaikan masalah lapangan.

### 1.5.1. Konsep *Governance*

Paradigma *governance* telah bergeser dari *government* ke *governance*, yang lebih menekankan kerjasama tata kelola dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan publik. *Governance* berasal dari kata "*govern*", yang berarti melakukan peran yang lebih besar (Agus Dwiyanto, 2015). Mencakup semua proses, peraturan, serta lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah publik secara keseluruhan. Dengan begitu secara lebih luas, *Governance* mencakup semua lembaga, organisasi, dan unsur masyarakat, baik yang bersifat pemerintah maupun non pemerintah. Menurut Steve Hatfiel Istilah *Governance* juga disebut dengan "tata kelola" menggambarkan kerangka kerja institusional yang mempengaruhi pilihan dan tindakan orang, terutama pendelegasian kekuasaan di dalam sebuah kelompok atau organisasi (seperti negara atau perusahaan).

*Governance* dapat dijelaskan sebagai interaksi politik antara pemerintah dan masyarakat dalam berbagai bidang yang terkait dengan kepentingan publik, serta intervensi pemerintah terhadap kepentingan-kepentingan tersebut. Dengan demikian, *governance* dapat dipandang sebagai suatu proses yang dinamis daripada sekedar struktur yang tetap (Islamy, 2018). Dari pernyataan diatas *governance* dan *adaptive governance* bekerja sama dan saling mendukung satu sama lain.

*Governance* atau tata kelola menyediakan kerangka kerja dasar dan prinsip-prinsip yang diperlukan untuk pengelolaan yang baik, *adaptive governance* menawarkan elemen yang fleksibilitas, pembelajaran, dan kemampuan beradaptasi yang diperlukan untuk menghadapi dinamika dan ketidakpastian. Dengan itu Organisasi atau pemerintah dapat lebih efektif menangani tantangan yang kompleks dan berubah-ubah dengan menerapkan prinsip-prinsip *adaptive governance* ke dalam *governance* atau tata kelolah pemerintah.

### 1.5.2. Adaptive Governance

*Adaptive Governance* mengacu pada hubungan antara penerapan inovasi dalam ilmu kebijakan publik, baik dalam proses perumusan kebijakan, desain struktur organisasi, maupun implementasi kebijakan yang efektif. Pendekatan ini juga mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu guna mendorong kemajuan dan kepentingan bersama dalam suatu konteks tertentu, seperti dalam sistem pengambilan keputusan yang menekankan transparansi. Menurut Armitage et al., dalam Engkus et al *adaptive governance* merupakan Pengelolaan bersama yang kolaboratif melibatkan pembagian kekuasaan antara masyarakat lokal dan pemerintah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pengambilan keputusan yang terdesentralisasi (Engkus et al., 2020). Dalam hal ini *adaptive governance* bisa mempercepat transisi pemerintahan yang bertujuan untuk mengatasi masalah kompleks yang dihadapi.

*Adaptive governance* membantu meningkatkan peran birokrasi, regulasi, dan tingkat manajemen lainnya. Dengan menerapkannya, dapat melihat seluruh pola pemerintahan untuk mendefinisikan kembali peran mereka dan membantu pemerintah mencapai tujuan organisasi dan kebijakan (Norman et al., 2020). Folke et al juga mendefinisikan *adaptive governance* yaitu bergantung pada jaringan yang menghubungkan individu, organisasi, lembaga, dan institusi di berbagai tingkat organisasi. Sistem pemerintahan adaptif biasanya berfungsi sebagai jejaring sosial, di mana tim dan sekelompok orang bekerja sama untuk membangun pemahaman bersama tentang kebijakan yang muncul untuk menjembatani organisasi yang tampaknya menurun akan perannya dan resolusi konflik, serta peraturan yang memungkinkan kebijakan pemerintah untuk mendukung sambil melakukan kreativitas untuk upaya pengelolaan bersama yang adaptif.

Kebijakan yang fleksibel dan responsif *Adaptive Governance* diperlukan untuk mendukung kebijakan pemerintah. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan disebut sebagai prinsip manajemen adaptasi. Konsep ini digunakan untuk

menjelaskan kemampuan manajemen untuk mengatasi masalah atau hambatan yang berasal dari sumber eksternal (Hurlbert & Gupta, 2016).

Serta menurut Djalante et al., (Djalante et al., 2011) *adaptive governance* mengacu pada kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan masalah yang dinamis dan kompleks. *Adaptive governance* dalam pemerintahan merupakan kemampuan pemerintah untuk, beradaptasi dengan situasi dan masalah yang terjadi di lingkungan, merespon secara fleksibel, serta belajar dari pengalaman. Djalante menyebutkan bahwa pelajaran utama dari *adaptive governance* yaitu ketidaksetaraan sebelumnya, kurangnya kepercayaan, dan pemerintahan yang tidak efektif dapat secara signifikan menghambat kolaborasi dan partisipasi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Dalam menganalisis atau mengukur permasalahan ini, djalante mempunyai 4 indikator dari teori *adaptive governance*, yaitu:

a) Lembaga yang polisentris dan berlapis-lapis

Lembaga polisentris dan berlapis-lapis merupakan konsep dalam tata kelola yang menggambarkan sistem di mana kekuasaan dan pengambilan keputusan tidak berfokus pada satu lembaga, namun oleh berbagai tingkatan dan jenis lembaga yang saling terkait. Visi polisentris ini mencakup banyak lembaga, tindakan dan pengambilan keputusan yang secara formal berbeda satu sama lain namun, mereka dapat bekerja sama atau membentuk sistem hubungan yang saling bergantung. Lembaga polisentris mengusulkan struktur yang banyak dan saling bergantung, memungkinkan lembaga lokal untuk menyesuaikan diri dengan konteks dan dinamika sosial yang terjadi. Pengaturan seperti ini dapat meningkatkan kepercayaan dan kerja sama, serta dapat mencapai hasil yang lebih efisien, adil, dan berkelanjutan.

b) Partisipasi dan Kolaborasi

Partisipasi secara sederhana berarti mengambil bagian dalam suatu kegiatan atau proses. Ketika seseorang berpartisipasi, mereka secara aktif terlibat dan memberikan

kontribusi, baik berupa gagasan, tenaga, maupun sumber daya serta berpartisipasi memunculkan solusi. Partisipasi disini dapat terjadi dalam berbagai konteks. Sedangkan kolaborasi dapat didefinisikan sebagai proses di mana pemangku kepentingan yang beragam, termasuk aktor pemerintah dan nonpemerintah, ataupun individu dan masyarakat yang bekerja sama menyatukan pengetahuan mereka untuk memecahkan permasalahan atau menciptakan suatu yang baru. Kedua konsep partisipasi dan kolaborasi ini sangat penting dimana, partisipasi adalah dasar dari kolaborasi, karena seseorang atau organisasi terlibat secara aktif dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.

c) Organisasi Mandiri dan Jaringan

Organisasi mandiri adalah sebuah kelompok atau lembaga yang dibentuk untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi ini biasanya berjalan secara independen dari pemerintah atau lembaga lainnya. Sedangkan Jaringan adalah sistem tata kelola yang biasanya informal dan terorganisasi, di mana berbagai pelaku bekerja sama di seluruh tingkat organisasi untuk mengatasi permasalahan yang sama. Dalam konteks organisasi mandiri, jaringan berfungsi sebagai sarana untuk memperluas jangkauan, berbagi sumber daya, dan memperkuat posisi. Dengan membangun jaringan yang kuat dapat menciptakan organisasi mandiri yang mencapai tujuan pembangunan dan berkelanjutan serta dapat menangani berbagai masalah sosial dengan lebih baik.

d) Pembelajaran dan Inovasi

Pembelajaran adalah kumpulan dari pengalaman, nilai, diskusi ataupun perdebatan, dan proses pengambilan keputusan yang digunakan sebagai cara untuk mengatasi masalah dan perubahan. **Pembelajaran juga** merupakan proses memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap dan ide baru serta pembelajaran juga bisa

melalui pengalaman sebelumnya. Pembelajaran memungkinkan akses yang beragam terhadap pengetahuan baru dan untuk mengimbangi perubahan ataupun ketidakpastian dalam sistem adaptif yang kompleks, pembelajaran berkelanjutan juga diperlukan.

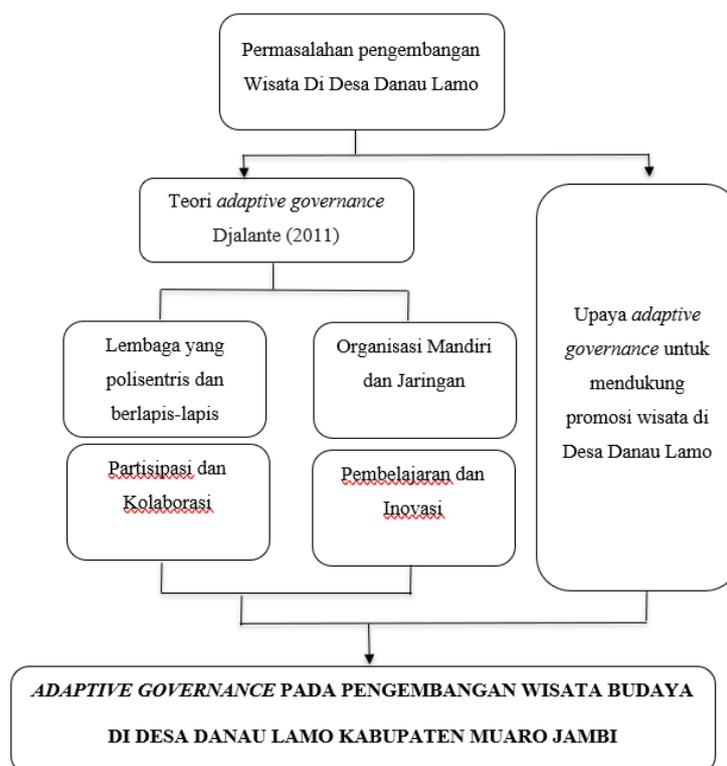
Sedangkan inovasi merupakan pengembangan ide-ide baru, atau proses baru yang berbeda dan lebih baik dari yang sebelumnya. Inovasi dan pembelajaran sangat terkait satu sama lain. Pembelajaran merupakan dasar inovasi, karena melalui pembelajaran individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan ide yang diperlukan untuk membuat sesuatu yang baru. Sebaliknya, inovasi mendorong pembelajaran yang lebih dalam dan lebih luas.

Dengan demikian, *adaptive governance* adalah bagaimana instansi atau lembaga dapat beradaptasi dengan perubahan dan kemajuan di lingkungan. Selanjutnya konsep *adaptive governance* juga melihat pemerintah memunculkan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, apakah solusi yang dimunculkan tersebut oleh lingkungan sekitar dapat beradaptasi atau tidak. Pemerintah adaptif bertujuan untuk melihat berbagai masalah, meliputi masalah sosial, ekonomi, pemerintah atau masalah yang lainnya (Endang Agustin, 2022).

Teori *adaptive governance* dapat membantu menjelaskan berbagai masalah dalam pengembangan wisata budaya di Desa Danau Lamo. Pengelolaan wisata di desa ini memerlukan sistem yang fleksibel, melibatkan banyak pihak, dan mendorong inovasi. Konsep ini cocok karena bisa menjadi solusi atas masalah seperti kurangnya partisipasi masyarakat, promosi digital yang lemah, dan koordinasi antar pihak yang belum maksimal. Dengan menerapkan *adaptive governance*, pemerintah dan masyarakat bisa bekerja sama lebih baik, memanfaatkan teknologi untuk promosi, dan membuat kebijakan yang lebih responsif. Hal ini diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan dan daya tarik wisata budaya di desa tersebut.

## 1.6. Kerangka Berpikir

**Gambar 1. 1. Kerangka Berpikir**



## 1.7. Metode Penelitian

### 1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Metode ini menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu sebagaimana adanya dan menjelaskan masalah yang diteliti melalui kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati, dengan menggunakan pendekatan induktif (Margono, 2005). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan deskriptif, yang berfokus pada masalah berdasarkan fakta populasi terkini. Ini mencakup kegiatan yang mengevaluasi sikap atau pendapat individu, organisasi, situasi, atau prosedur, yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian.

### 1.7.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah berada di **Desa Danau Lamo, Kabupaten Muaro Jambi**. Desa ini merupakan bagian dari Kabupaten Muaro Jambi, yang terletak di Provinsi Jambi,

Indonesia. Desa ini memiliki potensi wisata alam yang menarik, termasuk keindahan candi, kebudayaan lokal, dan tradisi masyarakat setempat.

### 1.7.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan sebagai batas masalah untuk membatasi peneliti dalam melakukan penelitian. Sebagai bagian dari proses melihat atau mengukur masalah penelitian. Fokus penelitian ini yaitu melihat bagaimana penerapan konsep *adaptive governance* dalam pengembangan objek wisata di Desa Danau Lamo.

### 1.7.4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merujuk pada informasi atau materi yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun temuan dalam studi mereka. Sumber data dapat berasal dari berbagai macam sumber, tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini peneliti akan menggunakan beberapa sumber data yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah jenis pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dari sumber utama atau asli, yang sebelumnya belum pernah ada. Dalam proses pengambilan data primer, peneliti mengumpulkan data langsung dari informan melalui interaksi langsung dengan objek penelitian. Metode pengumpulan data primer meliputi beberapa bentuk seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi (Dr. Lexy J. Moleong, 1988)

#### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder berbeda dengan data primer. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan untuk tujuan lain sebagai pendukung. Pada data sekunder ini data yang dihasilkan dari berbagai sumber yang memang sudah ada seperti. data dari karya ilmiah laporan pemerintah, data- data yang terbukti, dan sumber berita bahkan sejarah (Sarwono, 2013).

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang sudah tersedia sebelumnya, seperti dokumen resmi pemerintah, peraturan desa, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai dasar hukum dalam pengembangan wisata. Peneliti juga menggunakan data tentang kondisi Desa Danau Lamo, seperti jumlah penduduk, struktur perangkat desa, serta visi dan misi desa, untuk memahami kondisi sosial dan pemerintahan desa. Selain itu, informasi dari media online seperti Kompas.id dan Jambi Ekspres digunakan untuk menggambarkan kondisi terkini serta tantangan dalam pengembangan wisata budaya. Penelitian terdahulu juga dijadikan referensi untuk melihat perbedaan fokus kajian, khususnya dalam penerapan konsep *Adaptive Governance*. Dokumen lain seperti foto-foto objek wisata dan kegiatan budaya juga digunakan untuk memperkuat analisis. Semua data sekunder ini digabungkan dengan data primer agar hasil penelitian menjadi lebih akurat dan mendalam.

#### 1.7.5. Teknik Penentuan Informan

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih informan berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya karena mereka dianggap memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dengan topik penelitian. Dengan begitu, data yang diperoleh menjadi lebih berkualitas. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu metode pengambilan data yang dimulai dari sedikit informan, lalu berkembang dengan bantuan rekomendasi dari informan awal. Teknik ini digunakan karena pada awalnya jumlah informan terbatas dan belum cukup memberikan informasi yang dibutuhkan, sehingga diperlukan tambahan informan dari hasil rekomendasi. (Sugiyono, 2017).

Dalam penelitian ini, peneliti awalnya menentukan empat orang informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Namun, dengan penerapan teknik *snowball sampling*, jumlah informan bertambah menjadi enam orang.

**Tabel 1. 2. Data Informan Penelitian**

<b>Keterangan</b>	<b>Status</b>	<b>Alasan</b>
Kasi Pengembangan Daya Tarik Wisata, di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jambi.	Informan Kunci	Dinas Pariwisata bertanggung jawab menyusun kebijakan dan program pembangunan pariwisata, termasuk di Desa Danau Lamo. Mereka memiliki data dan informasi penting mengenai potensi wisata, prioritas pembangunan, serta alokasi anggaran yang relevan.
Pemerintah Daerah (Kepala Desa atau Sekretaris Desa Danau Lamo)	Informan Kunci	Memberikan data terkait potensi wisata dan strategi promosi yang diusung pemerintah. dan memberikan Informasi tentang infrastruktur digital dan pendukung media sosial.
Masyarakat lokal	Informan Kunci	Warga desa yang terlibat langsung dalam kegiatan pengembangan wisata atau komunitas wisata.
Wisatawan yang datang di wisata Desa Danau Lamo	Informan Pendukung	wisatawan yang berkunjung dapat memberikan perspektif tentang pengalaman dan kepuasan mereka terhadap fasilitas dan layanan wisata di Desa Danau Lamo.

*Sumber diolah oleh penulis pada tahun 2024*

### 1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga langkah, yaitu:

a) Wawancara

Dalam penelitian kualitatif teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data pada sebuah penelitian, Penelitian kualitatif mengumpulkan data melalui wawancara. Wawancara adalah proses komunikasi terstruktur di mana informasi dikumpulkan melalui interaksi langsung antara peneliti dan responden. Dalam konteks ini, data primer dianggap sebagai sumber utama wawancara karena mereka memiliki posisi dan karakteristik sosial yang relevan untuk memberikan informasi yang diperlukan.

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara terstruktur sebagai teknik pengumpulan data, dimana peneliti atau pengumpul data sudah memiliki informasi yang jelas dan pasti tentang yang ingin didapatkan. Selain itu, wawancara semi-terstruktur juga digunakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah secara lebih terbuka, sehingga responden dapat memberikan pendapat dan pemikiran mereka secara lebih bebas (Moleong, 1988).

Saat melakukan wawancara untuk mengumpulkan data, peneliti sering menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah informan yang tidak terbuka karena merasa takut atau tidak nyaman, sehingga peneliti harus membangun hubungan baik dan menjelaskan bahwa informasi yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya. Kadang juga terjadi salah paham karena bahasa yang dipakai kurang jelas, jadi peneliti harus menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti dan siap menjelaskan jika perlu. Peneliti juga harus hati-hati agar tidak mengarahkan jawaban responden, supaya data

yang didapat tetap alami. Selain itu, waktu yang terbatas menjadi kendala, sehingga peneliti perlu mengatur waktu dengan baik dan fokus pada pertanyaan penting.

b) Observasi

Observasi merupakan serangkaian teknik pengumpulan informasi di mana peneliti mengamati secara langsung fenomena yang terkait dengan subjek penelitian. Selama proses observasi, peneliti dapat mengamati berbagai aspek yang terkait dengan subjek, seperti perilaku, emosi, aktivitas, lokasi, konteks ruang dan waktu, serta tujuan dari kejadian tersebut (Mamik, 2015). Teknik Observasi adalah metode yang memungkinkan peneliti untuk mengamati dan menyelidiki perilaku nonverbal. Ada dua jenis observasi: partisipan, dimana peneliti terlibat langsung dalam situasi yang diamati, dan non-partisipan, di mana peneliti mengamati dari jauh tanpa berinteraksi langsung. Observasi partisipan merupakan suatu teknik dimana peneliti turut serta dalam suatu kegiatan organisasi yang sedang diteliti, sementara observasi non-partisipan adalah metode di mana peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan organisasi yang sedang diamati (Yusuf, 2017).

Karena peneliti tidak ikut serta dalam aktivitas yang dilakukan oleh narasumber, peneliti menggunakan teknik observasi non-partisipasi dalam penelitian ini. Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan dua kali proses observasi pada waktu dan situasi yang berbeda untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh dan akurat mengenai aktivitas yang diteliti. Observasi dilakukan selama jam operasional kegiatan berlangsung, dengan fokus pada perilaku, interaksi antar anggota, serta dinamika yang terjadi dalam konteks lingkungan organisasi. Adapun kegiatan yang diobservasi meliputi aktivitas pengelolaan objek wisata, keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata, serta interaksi antara pelaku wisata dengan wisatawan yang datang ke Desa Danau Lamo.

### c) Dokumentasi

Dokumen merupakan rekaman tertulis yang mengandung informasi mengenai individu, kelompok, peristiwa, atau situasi sosial yang relevan untuk keperluan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, hal tersebut sangat berguna sebagai sumber data. Peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen, seperti buku, peraturan, catatan, dan notulen, selama proses penelitian. Mereka juga dapat mendapatkan foto atau gambar yang terkait dengan topik penelitian. Diharapkan bahwa pendekatan dokumentasi ini akan membantu peneliti mendapatkan dan memahami informasi yang diperlukan untuk penelitian dengan lebih baik.

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang diperoleh peneliti berupa berbagai data tertulis dan gambar yang mendukung kajian tentang pengembangan wisata budaya di Desa Danau Lamo. Dokumen-dokumen tersebut mencakup peraturan desa, program pemerintah, dan kebijakan pariwisata yang menjadi dasar pengelolaan wisata. Peneliti juga mengumpulkan foto-foto objek budaya seperti Candi Koto Mahligai, alat musik Begambang, kerajinan anyaman, dan pertunjukan seni dari komunitas Mahligai Budaya. Selain itu, data jumlah penduduk dan struktur perangkat desa turut digunakan sebagai informasi pendukung. Peneliti juga mengambil kutipan dari berita media lokal seperti Kompas.id dan Jambi Ekspres untuk memperlihatkan kondisi terkini dan tantangan dalam pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Semua dokumentasi ini membantu peneliti memahami dan menjelaskan situasi secara lebih lengkap.

#### 1.7.7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan seiring dengan proses pengumpulan data dan tidak dilakukan setelah tahap pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Selama wawancara, peneliti secara bersamaan menganalisis tanggapan informan. Jika tanggapan tersebut belum memuaskan setelah dianalisis, peneliti akan menghindari

ketidakpastian data dengan mengajukan pertanyaan tambahan untuk memperdalam pemahaman.

Menurut Miles dan Huberman, analisis data adalah langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa data tersebut dapat dijelaskan secara detail (Mardawani, 2020). Jadi, dalam penelitian kualitatif, ada tiga cara untuk menganalisis data: tahap reduksi data, tahap penampilan data, dan tahap kesimpulan atau verifikasi.

#### **a. Reduksi Data**

Reduksi data adalah langkah penting dalam menyederhanakan informasi yang ditemukan dalam penelitian kualitatif. Teknik ini digunakan untuk menggambarkan, menemukan pola, serta menyusun tema dari data yang telah dikumpulkan, sehingga memberikan makna yang lebih dalam. Proses reduksi data melibatkan penyaringan, pengelompokan, pemusatan, penyingkiran, dan pembentukan data untuk mendukung proses pengambilan kesimpulan.

#### **b. Penyajian Data**

Penyajian data dalam penelitian kualitatif seringkali terjadi setelah proses pemilihan atau reduksi data. Metode ini melibatkan pembentukan ikhtisar, bagan, serta penggambaran hubungan antar kategori dan pola, yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman pembaca. Proses penyajian data ini memiliki tujuan untuk memungkinkan peneliti memahami konteks dan peristiwa yang terjadi, sehingga dapat merencanakan langkah-langkah berikutnya berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh.

#### **c. Kesimpulan**

Dalam analisis data kualitatif, langkah terakhir adalah membuat kesimpulan. Pada tahap awal, variabel-variabel mungkin mengalami perubahan. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk memiliki bukti yang konsisten dan kuat agar kesimpulan yang diambil dapat dipercaya. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu

menjawab pertanyaan penelitian serta menemukan hal-hal baru dalam bidang ilmu yang belum terungkap (Helaluddin, 2019).

### 1.7.8. Keabsahan Data

Peneliti harus melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar. Ini sangat penting untuk penelitian kualitatif karena memastikan bahwa temuan penelitian mencerminkan apa yang dilihat dan diakui oleh subjek penelitian. Untuk memastikan bahwa hasilnya akurat dan kredibel, peneliti melakukan pengamatan menyeluruh dan berkelanjutan dan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi menggabungkan data dari berbagai sumber untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar. Ini dapat mencakup analisis kasus, pengamatan sistematis berbagai situasi, atau konfirmasi hasil dengan sumber lain. Pada akhirnya, data yang diperoleh dengan metode ini menjadi lebih konsisten, terperinci, dan kuat (Risnaedi, 2021).

Dalam beberapa mekanisme triangulasi untuk menguji keabsahan data, peneliti menerapkan Triangulasi sumber, yang berarti membandingkan dan memverifikasi tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh dengan menggunakan waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dilakukan dengan:

1. Melakukan perbandingan data hasil pengamatan langsung dengan data dari hasil wawancara.
2. Melakukan perbandingan keadaan dan pandangan seseorang dengan berbagai perspektif orang seperti masyarakat biasa, dengan orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang memiliki kedudukan, orang pemerintahan.
3. Melakukan perbandingan wawancara dengan isi suatu data yang berkaitan.

Melakukan perbandingan apa yang dikatakan orang - orang tentang kondisi penelitian dengan apa yang diungkapkan sepanjang waktu.